

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2020-2024

Unit Organisasi	:	Inpektorat Jenderal
Tugas	:	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan;b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja operasional dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan;e. pelaksanaan adminitrasi Inspektorat Jendral; danf. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.
Program	:	Program Dukungan Manajemen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih.	1. Persentase unit kerja yang memperoleh skor evaluasi atas implementasi SAKIP minimal 80	Perbandingan antara jumlah Unit Kerja yang mendapatkan nilai evaluasi diatas 80 dengan jumlah unit kerja yang dievaluasi oleh Itjen	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Itjen
		2. Persentasi satker yang menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemeritahan (SAP)	Perbandingan antara jumlah Satker yang Laporan Keuangan-nya sesuai dengan SAP dengan jumlah seluruh Satker yang direviu oleh Itjen	Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
		3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal level 3	Perbandingan antara jumlah Unit Kerja yang mendapatkan skor maturitas SPIP minimal Level 3 dengan jumlah seluruh Unit Kerja yang dinilai maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP
		4. Persentase kepatuhan dalam penyampaian	Perbandingan antara jumlah Laporan Harta Kekayaan	Laporan LHKPN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Penyelenggara Negara yang sudah disampaikan kepada KPK dengan jumlah Wajib Lapo Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	
		5. Unit Kerja Pelayanan Publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" berdasarkan hasil penilaian Kemenpan dan RB	Hasil Penilaian WBK dan WBBM Kemenpan dan RB
2.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Internal	1. Persentase batas toleransi temuan kerugian negara dari total anggaran atas pemeriksaan BPK	Perbandingan antara Jumlah temuan kerugian negara berdasarkan LHP BPK dengan Total Pagu Anggaran Kemendag sesuai tahun objek pemeriksaan BPK	LHP BPK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Persentase jumlah temuan berulang hasil pengawasan	Perbandingan antara Jumlah temuan yang memiliki kondisi dan sebab yang sama pada temuan tahun sebelumnya di Unit Kerja/Satker yang sama dengan Jumlah temuan pada Unit Kerja/Satker di pengawasan terakhir	LHP dan data TLHP
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Perbandingan antara Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada Unit Kerja/Satker yang dipantau oleh Itjen dengan Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen	Data TLHP

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Persentase penyelesaian aduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal	Perbandingan antara Jumlah penyelesaian Aduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal dengan Jumlah Aduan Masyarakat yang diterima Inspektorat Jenderal	Data Adumas yang disampaikan kepada Itjen

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020
Inspektorat Jenderal,



SRIE AGUSTINA